



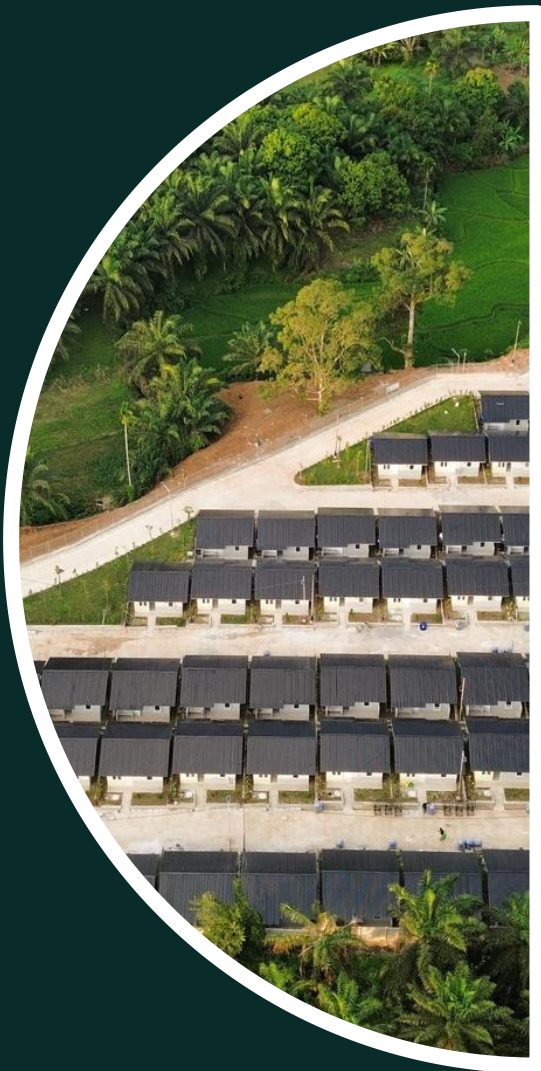
KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029

Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera III



KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra BP3KP Sumatera III Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi balai selama lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, sekaligus mendukung pelaksanaan

tahapan pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 menuju terwujudnya *Visi Indonesia Emas 2045*.

Dokumen Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis BP3KP Sumatera III yang selaras dengan kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, Renstra ini juga merumuskan arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja BP3KP Sumatera III selama periode 2025–2029.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Rencana Strategis BP3KP Sumatera III Tahun 2025–2029. Semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta mampu mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sehingga pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hunian yang layak huni, aman, dan berkelanjutan.

Pekanbaru, Desember 2025

**Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III**



Yenni Sofyan Mora, S.T., M.Si.

NIP. 19810421 200812 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	01
Daftar Isi	02
Daftar Gambar	03
Daftar Tabel	03
Daftar Lampiran.....	03
BAB I Pendahuluan	05
1.1 Kondisi Umum	05
1.2 Potensi dan Permasalahan	11
1.2.1 Analisis Permasalahan Jangka Menengah	11
1.2.2 Analisis Faktor Internal (BP3KP Sumatera III).....	16
1.2.3 Analisis Faktor Eksternal (Peluang dan Tantangan).....	18
1.2.4 Isu Strategis Jangka Mengengah BP3KP Sumatera III (2025 - 2029).....	20
BAB II Tujuan dan Sasaran	24
2.1 Tujuan Balai.....	24
2.2 Sasaran Program Balai	25
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, dan Kerangka Pendanaan.....	31
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Entitas Unit Organisasi	31
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Pemukiman	31
3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	33
3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	35
3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	36
3.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal	38
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III.....	40
3.3 Kerangka Kelembagaan	41
3.3.1 Fungsi Utama (Tugas dan Kewenangan).....	41
3.3.2 Struktur Organisasi BP3KP Sumatera III.....	42
3.3.3 Tata Laksana Internal (Hubungan Antarunit Organisasi Kementerian).....	44
3.3.4 Tata Laksana Eksternal (Kolaborasi dan Tata Kelola Data).....	45
3.3.5 Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).....	47
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	33
4.1 Target Kinerja.....	33
4.2 Kerangka Pendanaan	49
BAB V Penutup.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Provinsi Sumatera Barat.....	06
Gambar 1.2 Provinsi Riau	06
Gambar 1.3 Provinsi Kepulauan Riau	07
Gambar 2.1 Pohon Kinerja BP3KP Sumatera III	08
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BP3KP Sumatera III.....	43
Gambar 3.2 Diagram SOTK UPT di Kementerian PKP.....	44
Gambar 3.3 Hubungan Kerja Unit Organisasi, UPT (Balai) dan Pemerintah Daerah	45
Gambar 3.4 Komposisi Pegawai BP3KP Sumatera III	46
Gambar 3.5 Komposisi Pegawai BP3KP Sumatera III Berdasarkan Golongan	47
Gambar 3.6 Komposisi Pegawai BP3KP Sumatera III Berdasarkan Jabatan.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Kinerja BP2P Sumatera III Tahun 2020 - 2024.....	10
Tabel 1.2 <i>Backlog</i> Kepemilikan Rumah dan RTLH di Wilayah Sumatera III	12
Tabel 1.3 Kekuatan (<i>Strenghts</i>) BP3KP Sumatera III.....	16
Tabel 1.4 Kelemahan (<i>Weakness</i>) BP3KP Sumatera III	17
Tabel 1.5 Peluang (<i>Opportunities</i>) BP3KP Sumatera III	18
Tabel 1.6 Tantangan (<i>Threats</i>) BP3KP Sumatera III	20
Tabel 2.1 Sasaran Program BP3KP Sumatera III	25
Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	31
Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	33
Tabel 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	35
Tabel 3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	36
Tabel 3.5 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal.....	38
Tabel 4.1 Target Kinerja Rencana Strategis BP3KP Sumatera III Tahun 2025 - 2029.....	50
Tabel 4.2 Rencana Kerangka Pendanaan BP3KP Sumatera III Tahun 2025 - 2029.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks dan Kerangka Pendanaan.....	63
Lampiran 2. Metode Perhitungan	66

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) Hak atas tempat tinggal yang layak tidak hanya dimaknai sebagai tersedianya bangunan rumah, tetapi juga mencakup kualitas lingkungan permukiman yang aman, sehat, terjangkau, dan berkelanjutan. Dalam kerangka pembangunan nasional, sektor perumahan dan Kawasan permukiman berperan strategis sebagai instrumen peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kesenjangan sosial, serta penguatan ketahanan wilayah.

Sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung Pembangunan manusia unggul, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta penguatan ketahanan sosial dan lingkungan. Arah kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029 melalui target peningkatan proporsi rumah tangga berhunian layak hingga 74% serta penurunan luas Kawasan kumuh perkotaan menjadi maksimal 10.000 hektar pada tahun 2029. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemerintah menetapkan Program Tiga Juta Rumah sebagai program prioritas nasional yang menekankan percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau secara merata di Indonesia.

Dalam rangka mempermudah koordinasi serta mendorong pelaksanaan pembangunan perumahan dalam Program Tiga Juta Rumah di Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah ditetapkan 19 lokasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP), termasuk diantaranya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III untuk wilayah kerja di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 1.1 Provinsi Sumatera Barat



Gambar 1.2 Provinsi Riau



Gambar 1.3 Provinsi Kepulauan Riau

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III (BP3KP Sumatera III) merupakan hasil proses reorganisasi dan transformasi kelembagaan dari unit sebelumnya, yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III (BP2P Sumatera III) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Perubahan tersebut dilaksanakan seiring dengan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman masih dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui beberapa unit organisasi yaitu:

1. **Direktorat Jenderal Perumahan**, bertanggung jawab terhadap pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pelaksanaan Program Sejuta Rumah (PSR);
2. **Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur**, khususnya Direktorat Pembiayaan Perumahan, yang mengelola dukungan pembiayaan serta skema fasilitasi bagi penyediaan rumah rakyat; dan
3. **Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman pada Direktorat Jenderal Cipta Karya**, yang melaksanakan pengembangan Kawasan kumuh dan

penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Pada pelaksanaan reorganisasi, BP2P Sumatera III beralih menjadi BP3KP Sumatera III yang selanjutnya berada di bawah koordinasi serta bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, salah satu dari enam Unit Eselon I yang dibentuk di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Seiring perubahan tersebut, ruang lingkup tugas BP3KP mengalami perluasan, tidak hanya terbatas pada penyediaan perumahan, tetapi juga mencakup pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pascabencana dan kerusakan sosial, fasilitasi serah terima aset, serta pelaksanaan fungsi administrasi dan pengawasan internal.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dalam lingkup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Renstra ini berfungsi sebagai acuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan jangka menengah, baik di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III maupun di tingkat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta berperan sebagai instrumen pendukung dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Tabel 1.1 Capaian Kinerja BP2P Sumatera III Tahun 2020–2024 menyajikan capaian kinerja BP2P Sumatera III selama periode 2020–2024 berdasarkan indikator kegiatan/indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil pelaksanaan 2 (dua) sasaran kinerja BP2P Sumatera III, yaitu:

1. Penyediaan Akses Rumah Layak Huni
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan

Perbandingan realisasi kinerja BP2P Sumatera III dalam rentang periode tahun 2020–2024 menunjukkan persentase kinerja yang baik dan hampir seluruhnya memenuhi pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan terdapat juga kinerja yang melebihi target 100% yaitu pada indikator kinerja kegiatan bantuan PSU rumah umum di tahun 2023 dengan capaian 128,9%. Terdapat penurunan kinerja sebesar 2,66% yang dialami BP2P Sumatera III pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Jika dilakukan perbandingan kinerja periode 2020–2024, terdapat kinerja yang belum memenuhi target yang maksimal, yaitu pada indikator kinerja kegiatan jumlah bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya. Tidak tercapainya target maksimal tersebut disebabkan masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan

kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024.

1. Tahun 2021, terdapat 2.502 unit yang tidak tercapai dalam pelaksanaan BSPS (2.500 unit di Provinsi Sumatera Barat, 1 unit di Provinsi Kepulauan Riau). Realisasi di Provinsi Sumatera Barat relatif rendah disebabkan alokasi anggaran yang rendah karena terjadinya Pandemi COVID-19 dan anggaran BSPS yang bersumber dari NAHP yang tidak dapat diserap sehingga perlu dikembalikan kepada negara serta tidak tercapainya 1 unit di Provinsi Kepulauan Riau akibat calon penerima bantuan yang terdata pernah menerima bantuan pada tahun 2017.
2. Tahun 2022, terdapat 23 unit yang tidak tercapai dalam pelaksanaan BSPS (1 unit di Provinsi Kepulauan Riau, 22 unit di Provinsi Sumatera Barat). Tidak tercapainya 1 unit di Provinsi Kepulauan Riau terjadi karena pengunduran diri calon penerima bantuan akibat ketidakmampuan berswadaya, sedangkan di Provinsi Sumatera Barat tidak tercapai maksimal akibat calon penerima bantuan terdata pernah menerima bantuan pada tahun sebelumnya.
3. Tahun 2023, terdapat 36 unit yang tidak tercapai dalam pelaksanaan BSPS di Provinsi Sumatera Barat. Tidak tercapainya kegiatan ini secara maksimal dikarenakan pengunduran diri calon penerima bantuan karena ketidakmampuan berswadaya namun tidak dapat dilakukan pengganti karena tahun anggaran yang hampir berakhir. Terdapat juga Masyarakat yang tidak mampu memenuhi dokumen persyaratan serta adanya permasalahan lahan.
4. Tahun 2024, terdapat 45 unit yang tidak tercapai dalam pelaksanaan BSPS di Provinsi Sumatera Barat (40 unit) dan Provinsi Riau (5 unit).

Hasil capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan refleksi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BP3KP Sumatera III Periode 2025–2029 agar lebih terarah, adaptif, dan selaras dengan dinamika kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Tabel 1.1 Capaian Kinerja BP2P Sumatera III Tahun 2020 – 2024

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		Satuan	2020-2024		PK 2020			PK 2021			PK 2022			PK 2023			PK 2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
SK. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni																			
1	Jumlah laporan penyusunan perencanaan penyediaan perumahan	laporan	31	31	9	9	100,00	6	6	100,00	7	7	100,00	6	6	100,00	3	3	100,00
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	unit	45.030	44.608	12.410	12.410	100,00	7.550	5.048	66,86	8.380	8.357	99,73	10.640	10.604	99,66	8.234	8.189	99,45
3	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	unit	1.127	1.127	-	-	-	459	459	100,00	212	212	100,00	371	371	100,00	85	85	100,00
4	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	tower	53	53	16	16	100,00	-	-	-	16	16	100,00	17	17	100,00	4	4	100,00
5	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	unit	157	297	30	30	100,00	25	25	100,00	2	2	100,00	100	100	100,00	140	140	100,00
6	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	unit	75	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75	100,00	-	-	-
7	Jumlah Rumah umum yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	unit	3.746	4.318	-	-	-	831	831	100,00	370	370	100,00	1.975	2.547	128,96	570	570	100,00
8	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	laporan	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	100,00	3	3	100,00
SK. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan																			
1	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	layanan	13	13	3	3	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00
2	Jumlah layanan dukungan manajemen satker	layanan	19	19	3	3	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00
3	Jumlah layanan perkantoran	layanan	19	19	3	3	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00

1.2 Potensi dan Permasalahan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian PKP Tahun 2025–2029. Wilayah kerja BP3KP Sumatera III yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau memiliki karakteristik geografis, demografis, serta permasalahan perumahan yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, perdesaan, hingga pesisir dan kepulauan.

Kondisi tersebut menghadirkan potensi besar dalam percepatan penyediaan hunian layak dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, sekaligus tantangan struktural yang memerlukan pendekatan kebijakan dan intervensi yang adaptif, terpadu, dan berbasis wilayah.

1.2.1 Analisis Permasalahan Jangka Menengah

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja BP3KP Sumatera III dalam jangka menengah dihadapkan pada dinamika permasalahan yang bersumber dari kebutuhan nasional akan percepatan penyediaan perumahan layak, serta kondisi spesifik regional yang ditandai oleh tingginya *backlog* perumahan, sebaran RTLH, kawasan kumuh, kerentanan bencana, dan tantangan geografis pesisir-kepulauan. Analisis permasalahan jangka menengah difokuskan pada faktor-faktor yang secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman.

1. Tingginya *Backlog* Perumahan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Wilayah kerja BP3KP Sumatera III masih menghadapi tantangan *backlog* perumahan yang signifikan, yang mencerminkan besarnya kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. Menurut Dashboard Perumahan Nasional, di Provinsi Sumatera Barat, proporsi *backlog* perumahan mencapai $\pm 39,82\%$ (718.681 unit) dari total jumlah rumah tangga yang terdiri dari *backlog* kepemilikan rumah sebanyak 380.667 unit dan *backlog* RTLH sebanyak 338.014 unit menunjukkan bahwa hampir 4 dari 10 rumah tangga belum menempati hunian yang layak atau belum memiliki rumah sendiri. Angka *backlog* perumahan di Provinsi Sumatera Barat ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau dengan total *backlog* perumahan 24,23% (514.948 unit) dan Provinsi Kepulauan Riau dengan total *backlog* perumahan 26,29% (205.932 unit).

Tabel 1.2 *Backlog* Kepemilikan Rumah dan RTLH di Wilayah Sumatera III

No	Kabupaten/Kota	<i>Backlog</i> Kepemilikan	<i>Backlog</i> Kualitas	Total <i>Backlog</i> Perumahan
A	Prov. Sumatera Barat	380.667	338.014	718.681
1	Kota Padang	72.274	20.571	92.845
2	Kab. Agam	46.289	23.876	70.165
3	Kab. Lima Puluh Kota	30.215	37.790	68.005
4	Kab. Pesisir Selatan	35.257	28.945	64.202
5	Kab. Solok	24.823	35.831	60.654
6	Kab. Padang Pariaman	32.127	25.786	57.913
7	Kab. Tanah Datar	25.656	26.709	52.365
8	Kab. Pasaman Barat	18.340	32.723	51.063
9	Kab. Pasaman	16.198	31.954	48.152
10	Kab. Sijunjung	10.206	21.698	31.904
11	Kab. Dharmasraya	10.722	12.633	23.355
12	Kab. Solok Selatan	6.841	15.218	22.059
13	Kota Payakumbuh	11.807	3.011	14.818
14	Kota Bukittinggi	13.303	1.219	14.522
15	Kab. Kepulauan Mentawai	1.519	11.386	12.905
16	Kota Pariaman	8.930	2.575	11.505
17	Kota Padang Panjang	5.896	2.155	8.051
18	Kota Solok	6.301	1.228	7.529
19	Kota Sawahlunto	3.963	2.706	6.669
B	Prov. Riau	269.411	245.537	514.948
1	Kab. Indragiri Hilir	20.278	73.814	94.092
2	Kab. Kampar	35.499	23.827	59.326
3	Kota Pekanbaru	51.586	5.953	57.539
4	Kab. Rokan Hilir	24.415	26.039	50.454
5	Kab. Indragiri Hulu	16.792	24.872	41.664
6	Kab. Bengkalis	24.343	16.295	40.638
7	Kab. Rokan Hulu	21.704	15.219	36.923
8	Kab. Pelalawan	17.423	12.802	30.225
9	Kab. Kepulauan Meranti	9.976	19.432	29.408
10	Kab. Siak	18.488	10.043	28.531
11	Kab. Kuantan Singingi	14.292	12.538	26.830
12	Kota Dumai	14.615	4.703	19.318
C	Prov. Kepulauan Riau	101.354	104.578	205.932
1	Kota Batam	62.004	35.965	97.969
2	Kab. Karimun	12.461	16.235	28.696
3	Kota Tanjung Pinang	11.996	10.555	22.551
4	Kab. Bintan	6.341	11.836	18.177

5	Kab. Lingga	4.348	13.632	17.980
6	Kab. Natuna	2.638	8.585	11.223
7	Kab. Kepulauan Anambas	1.566	7.770	9.336

Sumber: Dashboard Perumahan 2025 (my.pkp.go.id)

Kondisi *backlog* ini memerlukan intervensi berkelanjutan melalui program-program seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta dukungan kebijakan perumahan lainnya untuk meningkatkan ketersediaan hunian layak.

2. Sebaran dan Karakter Kawasan Kumuh yang Dipengaruhi Geografis

Sebaran kawasan permukiman kumuh di wilayah kerja BP3KP Sumatera III memperlihatkan karakter yang beragam dan dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi geografis serta pola perkembangan wilayah. Perbedaan bentang alam, ketersediaan lahan, dan akses terhadap prasarana dasar menyebabkan permasalahan kawasan kumuh di Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau memiliki kompleksitas yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang kontekstual dan berbasis wilayah.

Di Provinsi Sumatera Barat, kawasan kumuh berkembang pada wilayah dengan keterbatasan ruang dan kondisi topografi yang menantang. Sebagai contoh, di Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bukittinggi Nomor 188.45-279-2020, ditetapkan 5 (lima) lokasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang tersebar di 3 (tiga) kelurahan, yaitu Kelurahan Campago Ipuh, Kelurahan Puhun Tembok di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, serta Kelurahan Tarok Dipo di Kecamatan Guguk Panjang, dengan total luas mencapai 64,78 hektar. Kawasan-kawasan tersebut umumnya ditandai oleh kepadatan bangunan yang tinggi, keterbatasan akses prasarana lingkungan, serta kondisi fisik wilayah yang membatasi ruang pengembangan permukiman, sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan penataan kawasan yang sensitif terhadap kondisi lingkungan setempat.

Sementara itu, di Provinsi Riau, permasalahan kawasan kumuh memiliki skala yang lebih luas dan tersebar di berbagai kabupaten/kota. Berdasarkan data DPUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2019-2023, total luas kawasan permukiman kumuh tercatat mencapai sekitar 1.561 hektar, yang tersebar di kabupaten/kota seperti Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Siak, dan Kepulauan Meranti. Sebaran kawasan kumuh tersebut mencakup kawasan permukiman padat perkotaan, kawasan tepian sungai, serta wilayah dengan keterbatasan prasarana dasar dan sanitasi. Luasan kawasan kumuh yang relatif besar dan tersebar ini menimbulkan

tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan, khususnya dalam memastikan keterpaduan program lintas sektor, efektivitas alokasi sumber daya, serta kesinambungan hasil penanganan di tingkat daerah.

Adapun di Provinsi Kepulauan Riau, permasalahan kawasan kumuh sangat dipengaruhi oleh karakter geografis kepulauan dan kawasan tepian air. Berdasarkan data SIM KOTAKU, kawasan kumuh yang telah tertangani di Kota Batam mencapai 139,09 hektar pada tahun 2020 dan 219,90 hektar pada tahun 2021, namun masih menyisakan sekitar 1.270,18 hektar kawasan kumuh yang belum tertangani. Selain itu, di Kota Tanjungpinang, kawasan permukiman kumuh banyak berkembang dalam bentuk permukiman pelantar yang tersebar di sepanjang garis pantai, seperti Kampung Tanjung Unggat, Kampung Bugis, Kampung Bulang, serta kawasan tepian air lainnya. Kawasan ini menunjukkan pola permukiman tidak teratur, kepadatan bangunan tinggi, dan keterbatasan prasarana lingkungan. Di luar kawasan pelantar, degradasi kualitas lingkungan juga terjadi pada permukiman padat perkotaan di pusat kota, seperti Kampung Kolam dan Kamboja, dengan total luasan kawasan kumuh mencapai 87,4 hektar sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 257 Tahun 2012.

Secara jangka menengah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kawasan kumuh di wilayah kerja BP3KP Sumatera III tidak bersifat homogen, baik dari sisi skala, karakter fisik, maupun tingkat kompleksitas penanganannya. Ketidaksamaan karakter kawasan kumuh antarprovinsi dan antardaerah ini berimplikasi pada perlunya pendekatan penanganan kawasan kumuh yang lebih adaptif, terpadu, dan berbasis karakter wilayah. Dalam konteks tersebut, BP3KP Sumatera III memiliki peran strategis untuk memperkuat fasilitasi teknis, mendorong perencanaan berbasis kawasan, serta memastikan keterpaduan intervensi pusat dan daerah agar penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

3. Kerentanan Bencana dan Dampaknya terhadap Kebutuhan Perumahan

Wilayah kerja BP3KP Sumatera III memiliki tingkat kerentanan bencana yang relatif tinggi dan beragam, yang secara langsung memengaruhi kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman dalam jangka menengah. Karakter geografis wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau menjadikan bencana alam sebagai faktor risiko yang perlu diantisipasi secara sistematis dalam perencanaan, penyediaan, dan peningkatan kualitas perumahan, baik melalui pembangunan baru, rehabilitasi, maupun penyediaan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana.

Di Provinsi Riau, bencana alam yang secara rutin terjadi setiap tahun meliputi banjir,

abrasi, dan kebakaran hutan dan lahan, yang berdampak langsung terhadap kerusakan hunian, penurunan kualitas lingkungan permukiman, serta meningkatnya kebutuhan penanganan rumah terdampak bencana. Kejadian banjir di kawasan dataran rendah dan sepanjang daerah aliran sungai, abrasi di wilayah tepian perairan, serta kebakaran lahan yang meluas menimbulkan tekanan berulang terhadap kondisi perumahan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Riau perlu mengintegrasikan aspek mitigasi bencana secara lebih kuat untuk mengurangi risiko kerusakan berulang dan meningkatkan ketahanan hunian.

Sementara itu, di Provinsi Sumatera Barat, kondisi geografis yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, longsor, dan banjir, berdampak signifikan terhadap keberlanjutan hunian masyarakat. Ancaman bencana tersebut meningkatkan kebutuhan akan perencanaan perumahan yang lebih adaptif dan aman, sekaligus mendorong kebutuhan penyediaan rumah khusus pascabencana bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau harus direlokasi dari kawasan rawan. Dalam jangka menengah, kondisi ini menuntut penguatan peran BP3KP Sumatera III dalam memfasilitasi perencanaan perumahan dan penyediaan hunian pascabencana yang layak, cepat, dan sesuai dengan karakter wilayah terdampak.

Kerentanan bencana di wilayah kerja BP3KP Sumatera III berdampak pada meningkatnya kebutuhan perumahan yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga menuntut kualitas hunian yang lebih tangguh terhadap risiko bencana. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan peran BP3KP Sumatera III dalam memfasilitasi perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana, termasuk melalui dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan serta penyediaan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana, agar pembangunan perumahan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan berketahanan.

4. Keterbatasan Kualitas dan Integrasi Data Perumahan dan Permukiman

Dalam jangka menengah, penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau masih dihadapkan pada keterbatasan kualitas dan integrasi data sektoral. Perbedaan sumber dan metodologi pendataan antara Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), data statistik perumahan BPS, serta basis data kesejahteraan sosial Kementerian Sosial menyebabkan variasi angka sasaran MBR, *backlog* perumahan,

RTLH, dan kebutuhan intervensi permukiman. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya ketepatan sasaran program, sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, serta efektivitas pengendalian dan evaluasi kinerja. Ketidakselarasan data tersebut menuntut penguatan peran BP3KP Sumatera III dalam memfasilitasi pemutakhiran, integrasi, dan pemanfaatan data perumahan dan permukiman sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih akurat, terpadu, dan akuntabel.

5. Belum Optimalnya Kesiapan Daerah dalam Pengelolaan Aset Perumahan

Penanganan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga memerlukan keberlanjutan pengelolaan aset seperti Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dan rumah susun setelah serah terima dari pusat ke daerah. Beberapa dokumen perencanaan daerah memperlihatkan langkah penataan dan rehabilitasi rumah khusus serta penanganan permukiman termasuk serah terima rumah korban bencana dan relokasi.

Namun, tidak semua pemerintah daerah memiliki kesiapan penuh, baik dari sisi SDM, kelembagaan, maupun pembiayaan operasional untuk terus menjalankan fungsi PSU dan rusun secara optimal setelah serah terima. Kekurangan kapasitas ini berpotensi menyebabkan aset yang dibangun kurang berfungsi secara efektif dalam jangka panjang.

1.2.2 Analisis Faktor Internal (BP3KP Sumatera III)

Faktor internal (kekuatan dan kelemahan) BP3KP Sumatera III merupakan elemen-elemen yang berada dalam kendali balai dan memengaruhi kemampuan balai dalam mencapai tujuannya.

1. Kekuatan (*Strengths*)

Tabel 1.3 Kekuatan (*Strengths*) BP3KP Sumatera III

No	Kekuatan (<i>Strengths</i>) BP3KP Sumatera III	Relevansi Terhadap Tugas dan Fungsi
S1	Mandat kelembagaan BP3KP Sumatera III yang komprehensif di bidang perumahan dan kawasan permukiman	BP3KP adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian PKP dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, memiliki mandat teknis pelaksanaan, fasilitasi, dan pembinaan program rumah swadaya (BSPS), rumah khusus (termasuk pascabencana), rumah susun, penanganan kumuh, serta prasarana, sarana, dan utilitas

		umum (PSU), sehingga mampu menjawab spektrum kebutuhan wilayah.
S2	Pengalaman BP3KP Sumatera III dalam penanganan <i>backlog</i> perumahan dan RTLH	Wilayah kerja BP3KP Sumatera III, khususnya Sumatera Barat, masih menghadapi <i>backlog</i> perumahan yang relatif tinggi ($\pm 39\%$), sehingga balai memiliki pengalaman praktis dalam mengarahkan program peningkatan kualitas hunian dan penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
S3	Kapasitas fasilitasi teknis lintas tipologi wilayah	BP3KP Sumatera III yang memiliki wilayah kerja dengan variasi tipologi geografis sehingga memperkuat peran balai sebagai fasilitator teknis dalam penyusunan perencanaan, desain teknis, serta pendampingan pelaksanaan program perumahan yang adaptif terhadap kondisi geografis.
S4	Peran strategis dalam serah terima aset perumahan dan permukiman	BP3KP Sumatera III berperan dalam fasilitasi serah terima aset PSU, rumah susun, dan rumah khusus kepada pemerintah daerah, sebagai bagian dari upaya menjamin keberlanjutan pengelolaan hasil pembangunan.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Tabel 1.4 Kelemahan (*Weakness*) BP3KP Sumatera III

No	Kelemahan (<i>Weakness</i>) BP3KP Sumatera III	Relevansi Terhadap Permasalahan
W1	Keterbatasan daya jangkau intervensi program perumahan terhadap besarnya backlog dan RTLH di wilayah kerja	Meskipun BP3KP Sumatera III memiliki mandat fasilitasi teknis dan pengendalian program, kapasitas daya jangkau intervensi yang difasilitasi balai belum sepenuhnya sebanding dengan besarnya backlog perumahan dan RTLH di wilayah Sumatera Barat (39%), Riau (24%), dan Kepulauan Riau (16%). Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan peran koordinatif dan optimalisasi strategi intervensi agar fasilitasi yang dilakukan balai dapat berdampak lebih luas dan sistemik.
W2	Basis data perumahan dan kawasan permukiman yang belum sepenuhnya mutakhir dan terintegrasi	BP3KP Sumatera III masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data perumahan dan permukiman yang bersumber dari berbagai sistem (BPS, DTSEN, dashboard PKP, dan data daerah). Belum

		optimalnya integrasi dan analisis data lintas sumber tersebut membatasi kemampuan balai dalam menyusun rekomendasi teknis yang sepenuhnya berbasis satu data yang mutakhir dan terverifikasi.
W3	Keterbatasan kapasitas fasilitasi dan pembinaan teknis balai terhadap pengelolaan aset perumahan pascaserah terima	Dalam proses serah terima dan pengelolaan aset PSU, rumah susun, dan rumah khusus, BP3KP Sumatera III masih memiliki keterbatasan pada instrumen pembinaan teknis, mekanisme asistensi berkelanjutan, serta dukungan monitoring pascaserah terima. Hal ini membatasi efektivitas balai dalam memastikan kesiapan daerah dan keberlanjutan fungsi aset perumahan dan permukiman.
W4	Keterbatasan kapasitas internal balai dalam menyediakan pendampingan teknis yang intensif dan spesifik wilayah	Dengan luasnya wilayah kerja serta kompleksitas karakter geografis (rawan bencana, pesisir, dan kepulauan), BP3KP Sumatera III masih menghadapi keterbatasan kapasitas internal dalam memberikan pendampingan teknis yang intensif, berkelanjutan, dan sangat spesifik lokasi. Kondisi ini menuntut penguatan peran balai sebagai pusat keunggulan teknis wilayah yang mampu merespons kebutuhan perencanaan perumahan dan permukiman berbasis karakter lokal.

1.2.3 Analisis Faktor Eksternal (Peluang dan Tantangan)

Faktor eksternal BP3KP Sumatera III (peluang dan tantangan) merupakan elemen-elemen yang berasal dari lingkungan di luar kendali balai, baik dari tingkat nasional (kebijakan/ekonomi makro) maupun regional (kondisi geografis/sosial).

1. Peluang (*Opportunities*)

Tabel 1.5 Peluang (*Opportunities*) BP3KP Sumatera III

No	Peluang (<i>Opportunities</i>) BP3KP Sumatera III	Dukungan Sumber
P1	Komitmen nasional percepatan penyediaan rumah layak bagi MBR	Komitmen nasional dalam penurunan backlog perumahan dan peningkatan akses hunian layak bagi MBR membuka peluang bagi BP3KP Sumatera III untuk memperluas skala dan variasi intervensi program, khususnya melalui rumah swadaya, rumah susun, dan rumah khusus. Dengan

		karakteristik wilayah kerja yang beragam, BP3KP Sumatera III memiliki posisi strategis dalam mengimplementasikan kebijakan perumahan berbasis pendekatan wilayah.
P2	Pengembangan Model Penanganan Permukiman Pesisir dan Kepulauan yang Adaptif dan Replikatif	Karakter geografis wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau yang memiliki garis pantai panjang, pulau-pulau kecil, serta kawasan pesisir padat membuka peluang bagi BP3KP Sumatera III untuk mengembangkan pendekatan hunian, PSU, dan sanitasi yang adaptif terhadap kondisi lingkungan laut, pasang surut, dan keterbatasan lahan. Model ini berpotensi menjadi praktik baik nasional dalam penanganan permukiman pesisir dan kepulauan.
P3	Penguatan Peran Strategis BP3KP dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana	Tingginya kerentanan bencana alam di Sumatera Barat (gempa bumi, banjir, longsor) membuka peluang bagi BP3KP Sumatera III untuk memperkuat peran sebagai fasilitator teknis wilayah dalam penyediaan rumah khusus pascabencana. Pengalaman penanganan bencana dapat dikapitalisasi sebagai penguatan kapasitas kelembagaan balai dalam perumahan tangguh bencana (<i>resilient housing</i>).
P4	Penyediaan Skema Pembiayaan Inovatif dan Kolaboratif	Keterbatasan daya beli masyarakat dan tingginya biaya logistik konstruksi di wilayah pesisir dan kepulauan membuka peluang pengembangan skema pembiayaan inovatif dan kolaboratif. Kehadiran KUR Perumahan, potensi Giro Wajib Minimum (GWM) BI, dukungan CSR, BAZNAS, dan filantropi lokal dapat dimanfaatkan BP3KP Sumatera III untuk memperluas sumber pendanaan perumahan secara berkelanjutan.
P5	Optimalisasi lahan <i>idle</i> (aset negara/BUMN/BUMD/aset sitaan) untuk perumahan terjangkau di lokasi strategis	Pemerintah daerah di wilayah kerja BP3KP Sumatera III memiliki potensi aset berupa lahan milik pemerintah daerah serta peluang kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sektor swasta. Optimalisasi aset tersebut dapat diarahkan untuk mendukung penyediaan hunian layak, rumah sewa, maupun pengembangan kawasan permukiman, termasuk melalui skema hunian berimbang dan pemanfaatan lahan <i>idle</i>.

2. Tantangan (*Threats*)

Tabel 1.6 Tantangan (*Threats*) BP3KP Sumatera III

No	Tantangan (<i>Threats</i>) BP3KP Sumatera III	Dukungan Sumber
T1	Kerentanan bencana alam yang meningkatkan kebutuhan perumahan secara tiba-tiba	Gempa bumi, banjir, dan longsor di Sumatera Barat berpotensi meningkatkan jumlah RTLH dan kebutuhan rumah khusus secara signifikan dalam waktu singkat.
T2	Tantangan geografis wilayah pesisir dan kepulauan	Kondisi kepulauan menyebabkan biaya logistik tinggi, keterbatasan material, serta kompleksitas pelaksanaan pembangunan perumahan dan PSU.
T3	Ketergantungan keberlanjutan aset pada kapasitas dan kesiapan daerah	Kapasitas pemerintah daerah yang belum merata serta belum siap secara kelembagaan dan pembiayaan berpotensi menimbulkan risiko pada rumah susun, PSU, dan rumah khusus tidak terkelola optimal pasca serah terima.

1.2.4 Isu Strategis Jangka Menengah BP3KP Sumatera III (2025–2029)

Berdasarkan analisis SWOT, BP3KP Sumatera III dihadapkan pada kondisi tingginya backlog dan RTLH, kompleksitas kawasan kumuh pesisir dan perkotaan, tantangan geografis kepulauan dan rawan bencana, serta keterbatasan kapasitas dan data daerah. Di sisi lain, terdapat peluang strategis berupa komitmen nasional percepatan penyediaan rumah, kebutuhan penanganan pesisir dan kepulauan, program rumah khusus pascabencana, inovasi pembiayaan perumahan, serta optimalisasi aset lahan negara dan daerah.

Dengan memfokuskan kekuatan internal BP3KP sebagai fasilitator teknis wilayah dan memanfaatkan peluang tersebut untuk mengatasi kelemahan serta memitigasi ancaman, maka isu-isu strategis Renstra BP3KP Sumatera III 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut.

1. Peningkatan Akses Perumahan Layak dan Terjangkau bagi MBR melalui Pendekatan Multiskema dan Berbasis Wilayah

BP3KP Sumatera III memanfaatkan perannya sebagai fasilitator teknis wilayah untuk mendorong peningkatan akses perumahan layak dan terjangkau bagi MBR melalui sinkronisasi program pembangunan baru, peningkatan kualitas rumah swadaya, penyediaan rumah susun, dan rumah khusus yang disesuaikan dengan karakter wilayah. Melalui pendampingan teknis dan koordinasi lintas sektor, BP3KP memastikan pemanfaatan berbagai skema pembiayaan perumahan serta

keterpaduan intervensi pusat dan daerah guna menurunkan backlog perumahan secara berkelanjutan.

2. Penanganan Permukiman yang Adaptif terhadap Kondisi Geografis dan Lingkungan

Dalam menghadapi tantangan geografis wilayah pesisir, kepulauan, dan kawasan dengan keterbatasan akses, BP3KP Sumatera III mengoptimalkan kekuatan kompetensi teknisnya untuk mendorong penanganan permukiman yang adaptif dan berkelanjutan. BP3KP berperan dalam memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum serta sanitasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga tercipta permukiman yang layak huni, sehat, dan berdaya tahan.

3. Penguatan Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu dan Kolaboratif Berbasis Kawasan

BP3KP Sumatera III memanfaatkan perannya sebagai pengendali teknis dan fasilitator kolaborasi untuk mendorong penanganan kawasan kumuh secara terpadu berbasis kawasan. Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait, BP3KP memastikan integrasi peningkatan kualitas hunian, penyediaan PSU, dan penataan lingkungan guna menurunkan tingkat kekumuhan secara berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Penguatan Tata Kelola Aset Perumahan dan Permukiman

Dalam rangka memastikan keberlanjutan manfaat aset perumahan dan permukiman, BP3KP Sumatera III memaksimalkan perannya sebagai mediator teknis pusat dan daerah untuk mempercepat proses serah terima serta penguatan pengelolaan aset PSU, rumah susun, dan rumah khusus. BP3KP melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam aspek kelembagaan, regulasi, dan pengelolaan agar aset yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal, terpelihara, dan berfungsi sesuai tujuan penyediaannya.

5. Penguatan Peran BP3KP Sumatera III sebagai Fasilitator Teknis Wilayah dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana

Menghadapi kerentanan bencana di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya, BP3KP Sumatera III memperkuat perannya sebagai fasilitator teknis wilayah dalam mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana. Melalui pendampingan teknis, koordinasi lintas sektor, dan penerapan standar rumah

tahan bencana, BP3KP berkontribusi dalam percepatan pemulihan hunian masyarakat secara terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

6. Penguatan Kapasitas Kelembagaan, SDM, dan Basis Data Perumahan dan Permukiman

BP3KP Sumatera III memanfaatkan mandat pembinaan teknis wilayah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, SDM, dan basis data perumahan dan permukiman di daerah. Melalui pendampingan peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemutakhiran serta integrasi data, BP3KP mendorong perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program perumahan dan permukiman yang lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

BAB II

TUJUAN DAN

SASARAN



BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Tujuan BP3KP Sumatera III dirumuskan sebagai pedoman arah penyelenggaraan tugas dan fungsi balai dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan memperhatikan karakteristik wilayah, tantangan permukiman, serta kebutuhan masyarakat di wilayah kerja BP3KP Sumatera III. Adapun tujuan BP3KP Sumatera III adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pertama adalah **“Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif”**, dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - 1) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
 - 2) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
 - 3) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - 4) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
 - 5) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
 - 6) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
 - 7) Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 - 8) Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen;
 - 9) Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni; dan
 - 10) Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.
- b. Tujuan kedua adalah **“Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian PKP”**, dengan indikator tujuan dari tersebut yaitu persentase peningkatan tata Kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.2 Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Sasaran BP3KP Sumatera III selaras dengan Sasaran Strategis (SS) Kementerian, di mana BP3KP berfungsi sebagai unit pelaksana teknis (operator) yang memastikan 100% implementasi kebijakan di lapangan. Secara rinci, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, hingga Indikator Kinerja BP3KP Sumatera III disajikan pada tabel berikut.

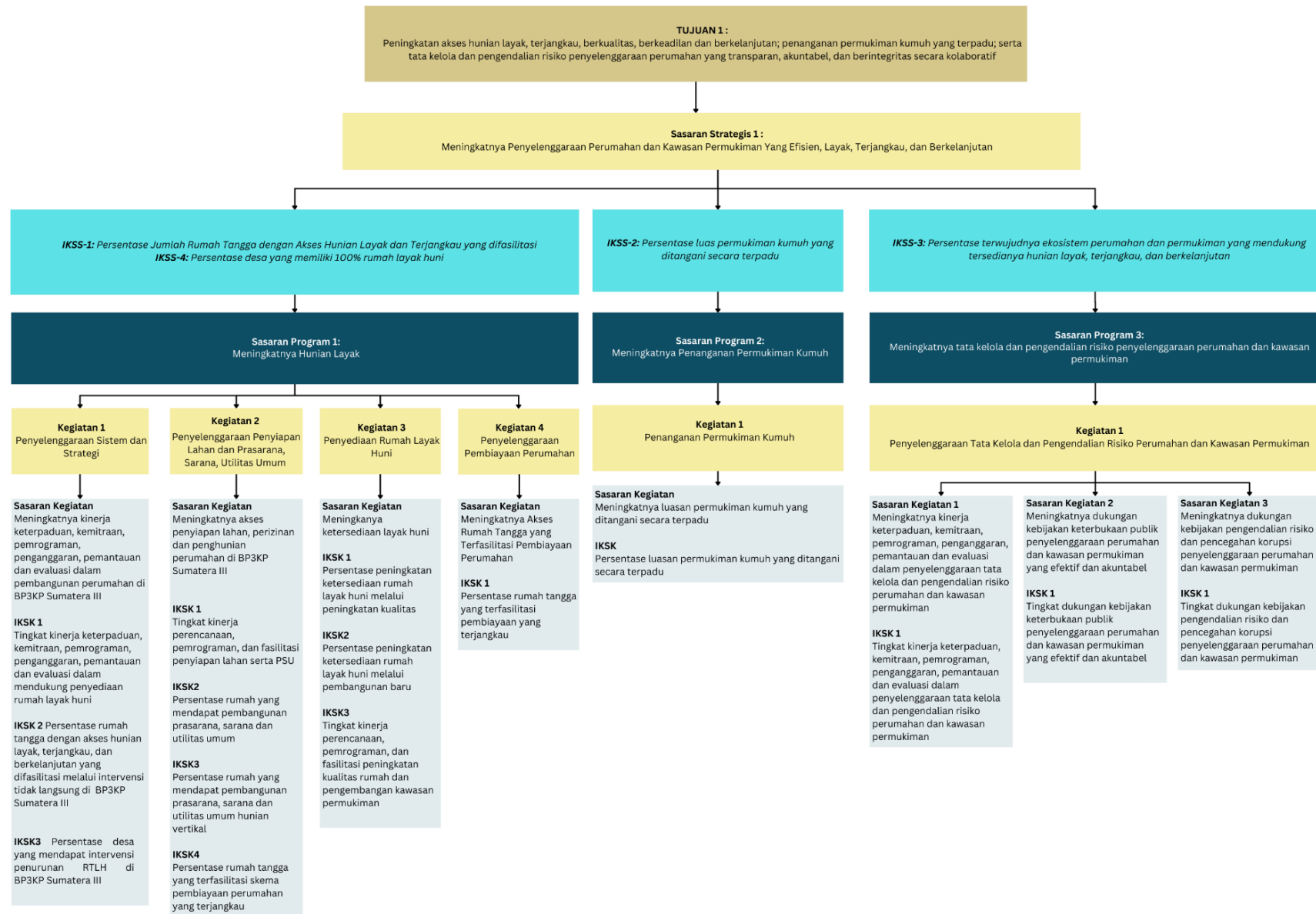
Tabel 2.1 Sasaran Program BP3KP Sumatera III

No	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKSK
1	Meningkatnya Hunian Layak	1. Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam Pembangunan perumahan di BP3KP Sumatera III	1. Tingkat inerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni 2. Persentase umah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di BP3KP Sumatera III 3. Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di BP3KP Sumatera III
		2. Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di BP3KP Sumatera III	1. Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU

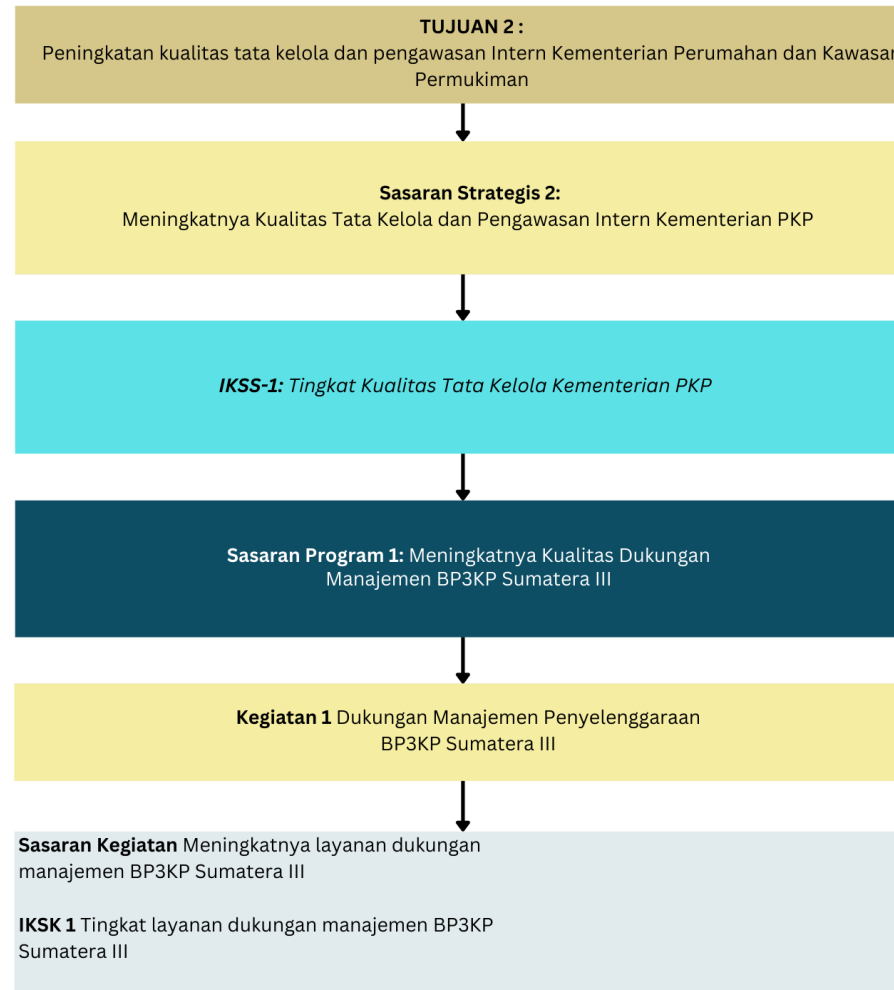
No	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKSK
				2. Persentase rumah yang mendapat Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum 3. Persentase rumah yang mendapat Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal 4. Persentase rumah tangga yang terfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang terjangkau
		3. Penyediaan Rumah Layak Huni	Meningkatnya ketersediaan layak huni	1. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas 2. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru 3. Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasa permukiman
		4. Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau

No	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKSK
2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	1. Penanganan Permukiman Kumuh	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
3	Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman	1. Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Meningkatkan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko
			2. Meningkatkan dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1. Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan public penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel
			3. Meningkatkan dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1. Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
4	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BP3KP Sumatera III	1. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan BP3KP Sumatera III	Meningkatnya layanan dukungan manajemen BP3KP Sumatera III	1. Tingkat layanan dukungan manajemen BP3KP Sumatera III

Gambar 2.1 Pohon Kinerja BP3KP Sumatera III



Gambar 2.1 Pohon Kinerja BP3KP Sumatera III



BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBANGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Entitas Unit Organisasi

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, diperlukan arah kebijakan dan strategi yang terintegrasi pada seluruh entitas unit organisasi. Setiap unit organisasi memiliki peran, fungsi, dan mandat strategis yang saling melengkapi dalam mewujudkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, berkelanjutan, serta dikelola secara efektif dan akuntabel.

Kementerian PKP melalui lima unit organisasi, yaitu Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Sekretariat Jenderal, serta Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, menjalankan peran strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional di bidang perumahan dan Kawasan permukiman. Arah kebijakan dan strategi pada masing-masing unit organisasi selanjutnya dijabarkan untuk memberikan fokus, prioritas, serta pendekatan pelaksanaan yang selaras dengan sasaran strategis kementerian.

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Untuk mendukung pencapaian sasaran Renstra Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (DJKP) tahun 2025–2029, telah dirumuskan arah kebijakan yang berfokus pada empat pilar utama. Setiap pilar kebijakan dijabarkan melalui strategi pembangunan kawasan permukiman untuk melaksanakan arah kebijakan yang telah dirumuskan serta mendukung ketercapaian sasaran Renstra.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian	a. Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus dan rumah swadaya

	layak melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan	b. Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi c. Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau d. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada hunian tapak & vertikal
2	Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif	a. Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya b. Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung kapasitas stakeholder perumahan dan masyarakat c. Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang
3	Meningkatkan kualitas perumahan secara terpadu	a. Pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu b. Penataan kawasan kumuh melalui Pembangunan infrastruktur kawasan permukiman (rumah, jalan, drainase, sanitasi, air minum, persampahan, dan proteksi kebakaran)
4	Menguatkan ekosistem perumahan dan Kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak	a. Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman b. Peningkatan kolaborasi antar stakeholder dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan c. Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman d. Memberikan pembinaan pada pelaku usaha dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan e. Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan f. Pemanfaatan novasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan difokuskan pada peningkatan akses masyarakat perdesaan terhadap hunian layak dan terjangkau melalui implementasi skema penyelenggaraan perumahan yang inovatif secara kolaboratif.

Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan	a. Percepatan pembangunan baru rumah di wilayah perdesaan; b. Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan; c. Penyediaan PSU perumahan di wilayah perdesaan; d. Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan e. Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.
2	Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif	a. Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan; b. Pengembangan skema tabungan berencana; c. Pengembangan bantuan tunai/ <i>in-kind</i> yang terintegrasi dengan program pembangunan desa; d. Pengembangan skema kredit renovasi rumah (KRR) dan Kredit bangun rumah (KBR); e. Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan f. Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB, dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.
3	Menyediakan sistem regulasi,	a. Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang

	pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi	perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan; b. Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan; c. Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan; d. Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan; e. Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervise penyelenggaraan perumahan perdesaan; f. Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan g. Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.
4	Meningkatkan kolaborasi antarpemangku dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan	a. Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan; b. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan; c. Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara pemerintah pusat dan daerah; d. Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan e. Penguatan kelembagaan.

3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Tabel 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan	a. Percepatan pembangunan baru rumah di wilayah perkotaan; b. Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan; c. Penyediaan PSU perumahan di wilayah perkotaan; dan d. Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
2	Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal,	Mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu, seperti kawasan campuran dan Kawasan TOD.
3	Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan Kawasan strategis dan transportasi publik (TOD)	Mengembangkan kawasan perumahan berbasis transit (TOD) dan kawasan perkotaan baru.
4	Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan	a. Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan; b. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan; c. Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d. Pelaksanaan koordinasi antarpemangku

		kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan e. Penguatan kelembagaan.
5	Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	Pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antarlevel pemerintahan.
6	Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR	a. Inovasi pembiayaan mikro perumahan; b. Kredit konstruksi swadaya; dan c. Kolaborasi dengan lembaga keuangan nonbank.
7	Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital	a. Penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini; b. Digitalisasi sistem monitoring; dan c. pemutakhiran basis data rumah.
8	Percepatan penghunian	a. revitalisasi rusun; b. pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni; c. integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.

3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR)

Tabel 3.4 Arah Kebijakan dan Strategi
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat	Penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional.
2	Peningkatan kualitas tata kelola	Penguatan tata kelola yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang terjangkau, layak

	hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan NSPK yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan perumahan publik	huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
3	Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan diluar FLPP 100% KPR, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi dan tata Kelola pembiayaan perumahan	a. Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai tambahan pembiayaan, penggunaan skema pinjaman/hibah multilateral, dan program perumahan hijau dan terjangkau di Indonesia (<i>Indonesia Green Affordable Housing Program</i> atau IGAHP). b. Melakukan koordinasi secara intensi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain. c. Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dan sistem antrean perumahan. d. Regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan keputusan menteri untuk mendukung efektivitas kebijakan.
4	Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Penyusunan Surat Edaran Menteri tentang Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5	Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dengan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dan pengaturan mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman.
6	Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya	a. <i>Governance</i>, penyusunan NSPK dan bimbingan teknis tata kelola dan pengendalian risiko; b. <i>Risk</i>, penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko; c. <i>Compliance</i>, penancangan dan pembangunan zona integritas, sistem informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), sistem manajemen anti penyuapan

		(SMAP), dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; d. <i>Financing</i>, kerjasama investasi asing, antrean perumahan, FLPP, IGAHP, skema jaminan penyerapan (<i>off-take guarantee</i>); dan e. Pembangunan baru atau renovasi melalui CSR dan penyiapan lahan.
--	--	--

3.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

Tabel 3.5 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Penguatan Perencanaan dan Penganggaran	a. Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan b. Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.
2	Transformasi Digital dan Tata Kelola	a. Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta system pengadaan barang dan jasa; dan b. Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
3	Penguatan Sumber Daya Manusia	a. Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis analisis bebank (ABK) dan kompetensi; b. Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan

		c. Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.
4	Penguatan Sistem Informasi dan Data	a. Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis satu data Indonesia; dan b. Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>).
5	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	a. Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan b. Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.
6	Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum	a. Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan b. Digitalisasi dan penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).
7	Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN	a. Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan b. Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
8	Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	a. Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan b. Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem <i>e-Procurement</i> untuk efisiensi dan transparansi.
9	Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	a. Penyusunan NSPK komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis teknologi dan informasi, dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan b. Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan media untuk memperluas jangkauan

		informasi dan mitigasi disinformasi.
10	Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif	a. Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk CSR dan sumber pendanaan Non APBN; dan b. Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP3KP Sumatera III menetapkan arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, yaitu **Menjamin peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau melalui pembangunan baru, peningkatan kualitas dan fasilitasi pembiayaan perumahan.**

Arah kebijakan tersebut merupakan respons atas hasil analisis SWOT yang menunjukkan masih tingginya *backlog* perumahan dan RTLH, sebaran kawasan kumuh, keterbatasan kapasitas daerah, serta tantangan pengelolaan aset perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja BP3KP Sumatera III. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut, BP3KP Sumatera III menetapkan 4 (empat) strategi utama sebagai berikut:

1. **Penguatan layanan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau** dengan fokus implementasi pada fasilitasi dan pendampingan teknis pelaksanaan program rumah swadaya (BSPS) melalui peningkatan kualitas dan/atau pembangunan baru, dukungan penyediaan rumah susun dan rumah khusus, termasuk rumah khusus pascabencana di wilayah rawan bencana seperti Sumatera Barat, penguatan sinergi pusat-daerah dalam penajaman lokasi dan sasaran penerima manfaat berbasis data perumahan dan kawasan permukiman.
2. **Penguatan layanan penanganan permukiman kumuh yang terpadu secara kolaboratif** dengan fokus implementasi pada fasilitasi penanganan kawasan kumuh secara terpadu melalui integrasi peningkatan kualitas hunian, penyediaan PSU, dan peningkatan akses sanitasi, penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, pendampingan teknis perencanaan kawasan yang adaptif terhadap keterbatasan lahan dan kondisi geografis wilayah.

3. **Penguatan layanan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas** dengan fokus implementasi pada penguatan sistem perencanaan dan pengendalian berbasis data perumahan, RTLH, kawasan kumuh, sanitasi, dan PSU, fasilitasi proses serah terima aset rumah susun, PSU, dan rumah khusus kepada pemerintah daerah secara tertib dan sesuai ketentuan, pendampingan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan aset perumahan dan kawasan permukiman secara berkelanjutan.
4. **Penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern BP3KP Sumatera III** dengan fokus implementasi pada peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program perumahan dan kawasan permukiman, penguatan sistem pengawasan intern dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan kegiatan, penguatan fungsi kehumasan dan pelaporan kinerja untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.

3.3.1 Fungsi Utama (Tugas dan Kewenangan)

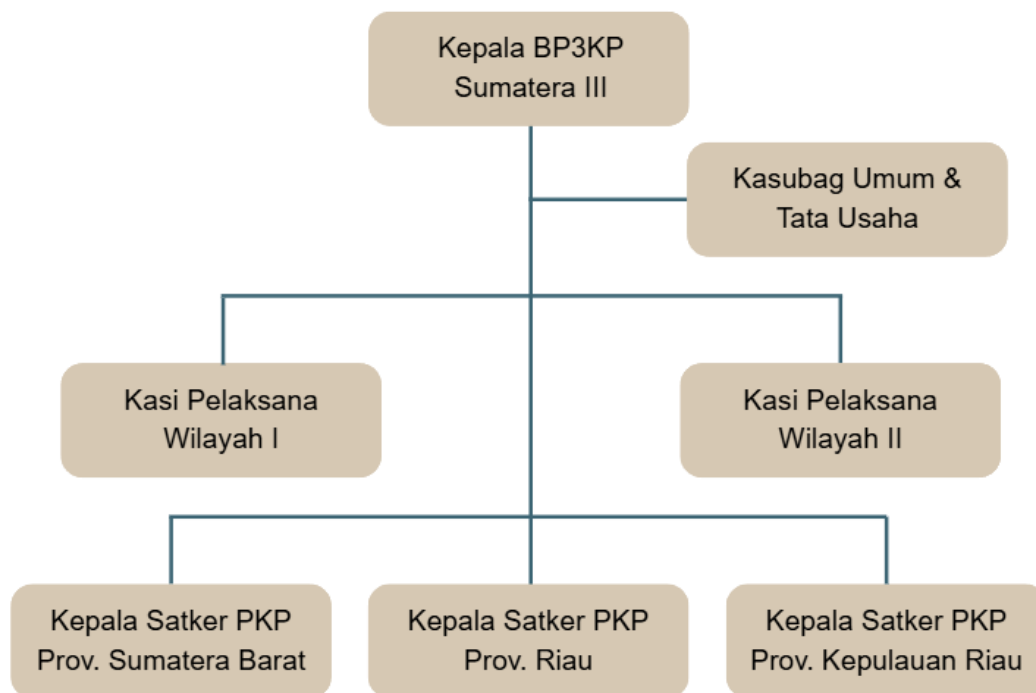
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III merupakan balai kelas I dan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima asset. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis

- pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
 7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
 8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
 9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
 10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
 11. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
 12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
 13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
 14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
 15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

3.3.2 Struktur Organisasi BP3KP Sumatera III

Struktur organisasi BP3KP Sumatera III dirancang sebagai kerangka kelembagaan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi balai dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja. Susunan organisasi ini menggambarkan hubungan koordinatif dan hierarkis antar unit kerja, mulai dari pimpinan balai hingga unsur pelaksana teknis, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya. Pembentukan dan penetapan struktur organisasi BP3KP Sumatera III mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BP3KP Sumatera III

Susunan organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas:

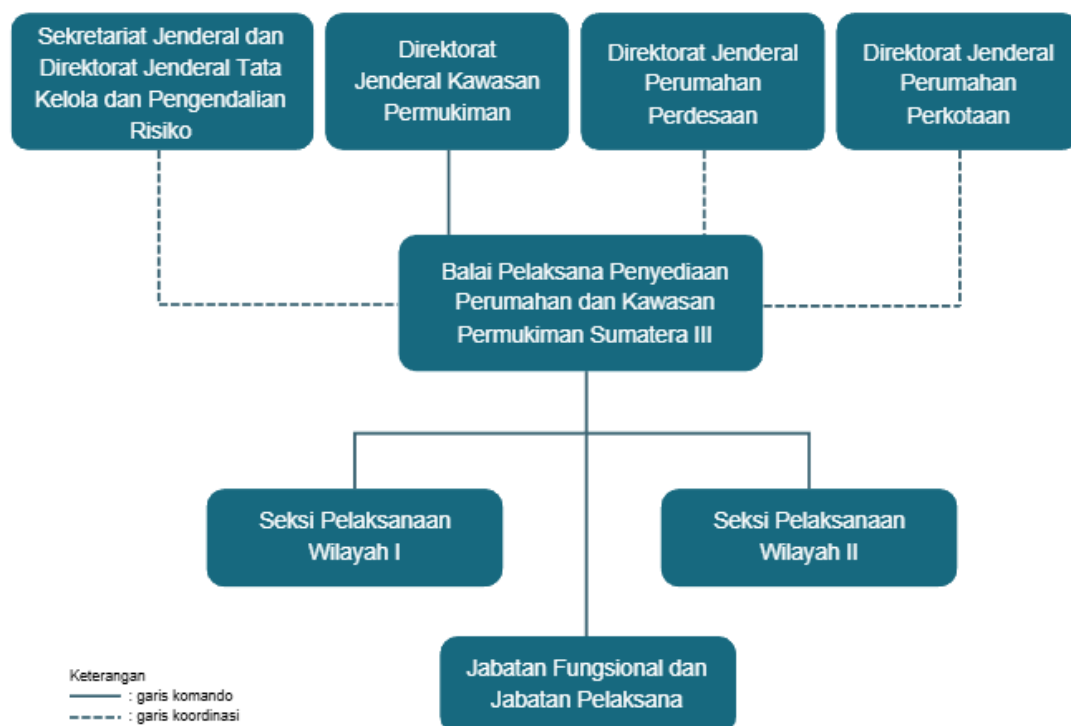
1. **Kepala Balai**, bertugas sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi BP3KP di wilayah Sumatera III.
2. **Subbagian Umum dan Tata Usaha**, mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.
3. **Seksi Pelaksanaan Wilayah I**, mempunyai tugas:
 - Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan Kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial; dan
 - Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data.
4. **Seksi Pelaksanaan Wilayah II**, melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan

prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data.

3.3.3 Tata Laksana Internal (Hubungan Antarunit Organisasi Kementerian)

Sebagai unit pelaksana di daerah, BP3KP berperan strategis dalam memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar mampu menjalankan fungsi penyelenggaraan kawasan permukiman secara efektif. Melalui pembinaan, fasilitasi teknis, pendampingan program, serta koordinasi lintas sektor, BP3KP memastikan bahwa kebijakan, standar, dan regulasi nasional dapat diterapkan secara konsisten di daerah.

BP3KP bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman serta berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, sebagaimana ditunjukkan dalam struktur organisasi. Melalui peran koordinatif ini, BP3KP menjadi penghubung penting antara kebijakan pusat dan implementasi daerah, sehingga penyelenggaraan kawasan permukiman dapat berlangsung lebih terarah, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.



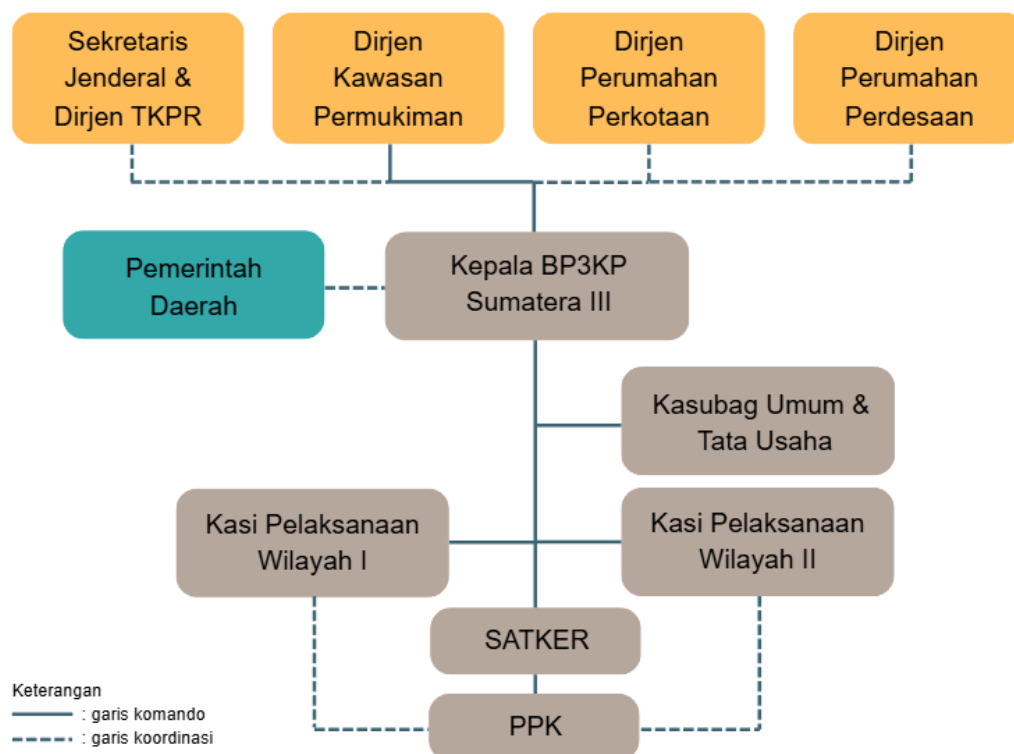
Gambar 3.2 Diagram SOTK UPT di Kementerian PKP

Hubungan Kerja Unit Organisasi (Pusat), UPT (Balai), dan Perbendaharaan (Kesatkeran):

- Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman serta berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
- Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha melakukan pengelolaan kepegawaian, laporan keuangan dan asset dan atas seijin serta persetujuan kepala balai yang selanjutnya dikoordinasikan kepada Sekretariat Jenderal
- Kepala Satuan Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- PPK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja dan berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pelaksanaan
- Balai melaksanakan fungsi koordinasi, kolaborasi dan sinergi pemrograman penanggulangan bencana, penyediaan lahan, dan pengembangan hunian

3.3.4 Tata Laksana Eksternal (Kolaborasi dan Tata Kelola Data)

Tata laksana eksternal diarahkan pada penguatan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Kolaborasi tersebut didukung oleh pemanfaatan sistem data terintegrasi guna meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.



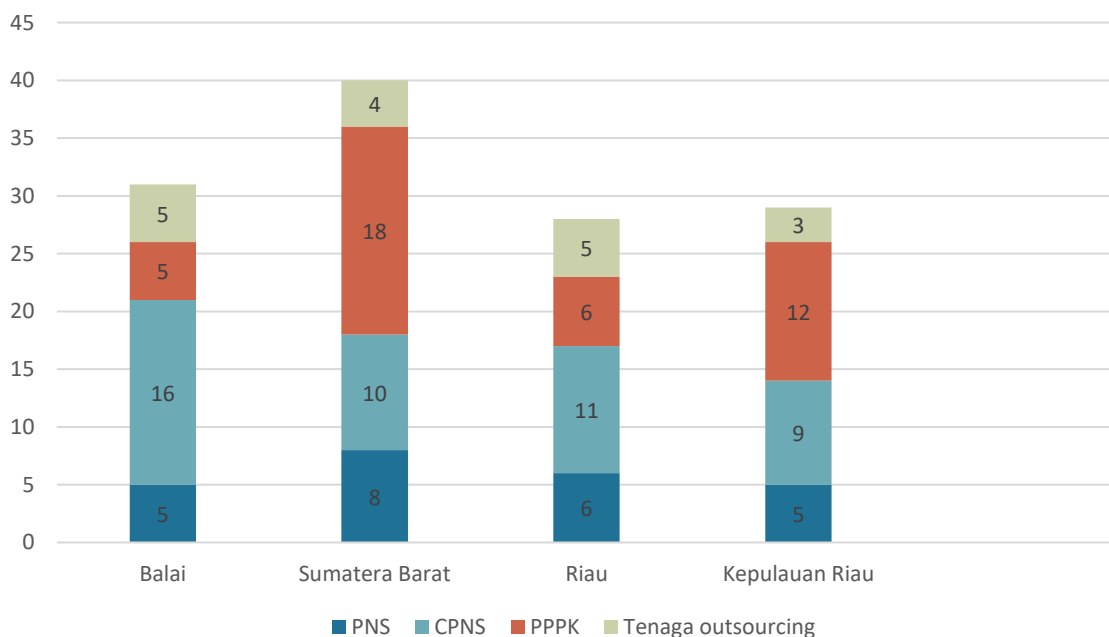
Gambar 3.3 Hubungan Kerja Unit Organisasi, UPT (Balai) dan Pemerintah Daerah

Untuk mengatasi keterbatasan pendanaan, diterapkan skema pendanaan kolaboratif yang melibatkan APBN, APBD, Dana Desa, serta kontribusi non-pemerintah melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penguatan kemitraan kelembagaan daerah dilakukan melalui optimalisasi peran Pokja PKP dan Forum PKP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan program mengedepankan pemanfaatan data terpadu sebagai dasar kebijakan guna menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat. Seluruh pelaksanaan tata laksana eksternal dilaksanakan dengan memperhatikan kepatuhan hukum dan penegakan regulasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.5 Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

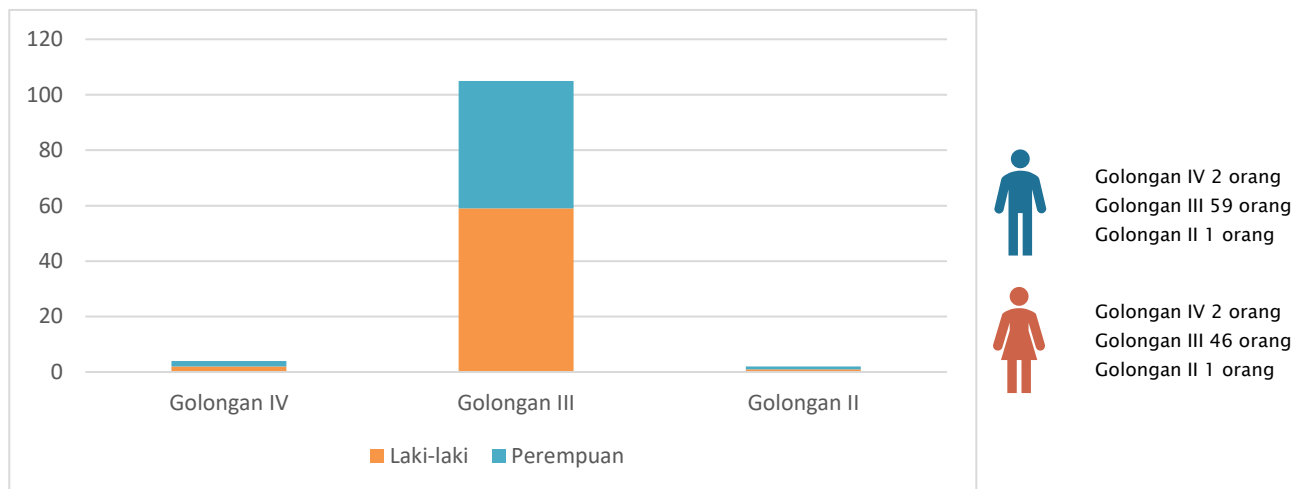
Dalam rangka mendukung Rencana Strategis tahun 2025–2029, di tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didukung oleh SDM sebanyak 128 orang yang terdiri atas 24 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 46 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 41 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 17 orang tenaga *outsourcing*.

Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dilaksanakan dengan dukungan SDM yang mencakup wilayah kerja Balai, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau.



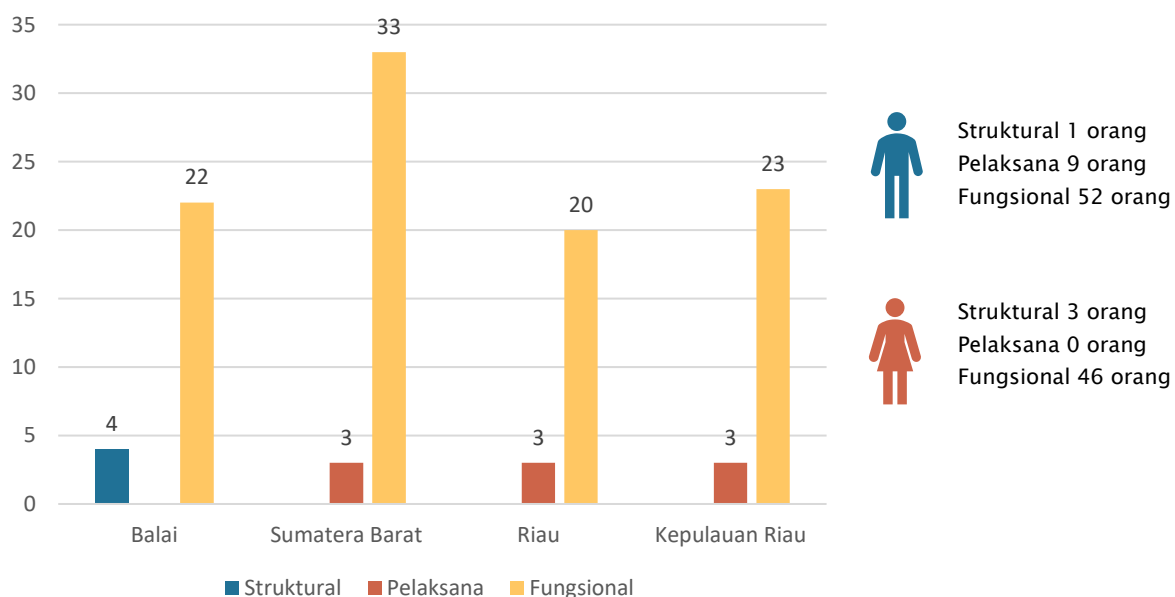
Gambar 3.4 Komposisi Pegawai BP3KP Sumatera III

Berdasarkan golongan, PNS, CPNS dan PPPK Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III sebanyak 111 orang didominasi oleh golongan II sebanyak 2 orang atau 1,80% golongan III sebanyak 105 orang atau 94,60%. Sementara, golongan IV sebanyak 4 orang atau 3,60 %. Perbandingan PNS dan PPPK di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III secara menyeluruh berdasarkan golongan dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 3.5 Komposisi Pegawai BP3KP Sumatera III Berdasarkan Golongan

Pada tahun 2025, Pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didominasi oleh jabatan fungsional sebanyak 105 orang yang didominasi oleh jabatan fungsional penata kelola perumahan.



Gambar 3.6 Komposisi Pegawai BP3KP Sumatera III Berdasarkan Jabatan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III untuk periode 2025–2029 dirumuskan sebagai bentuk komitmen unit kerja dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penetapan target kinerja tersebut disusun melalui pendekatan perencanaan berbasis kinerja, dengan menurunkan Sasaran Strategis (SS) Kementerian PKP ke dalam target yang bersifat spesifik, terukur, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu (*SMART*) sesuai dengan karakteristik wilayah Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Indikator kinerja yang digunakan mencerminkan hierarki kinerja secara berjenjang (*cascading*), mulai dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai dampak (*impact*), Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai hasil (*outcome*), hingga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Output sebagai wujud keluaran nyata. Penetapan target tersebut diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis utama, meliputi penurunan backlog kepemilikan dan kelayakan hunian, penanganan kawasan kumuh secara terpadu, serta penguatan kualitas tata kelola internal Balai.

Tabel 4.1 Target Kinerja Rencana Strategis BP3KP Sumatera III Tahun 2025–2029

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET					
							2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1				-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan												
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:												
1			Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi									
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak												
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi												
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III												
OUTPUT KEGIATAN:												
		1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman				Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	5
		2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman				Dokumen	-	1	1	1	4
		3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman				Laporan	1	1	1	1	5
		4	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan				Kegiatan	1	-	-	-	1
		5	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan				Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	4
		6	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan				Dokumen	-	1	1	1	4
		7	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan				Laporan	-	1	1	1	4
		8	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan				Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	4
		9	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan				Laporan	-	1	1	1	4

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III									
OUTPUT KEGIATAN:									
	1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	-	1.176	1.176	1.176	1.176	4.704
	2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	-	-	-	-	-
	3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	1	1	1	3
	4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4
	5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni									
OUTPUT KEGIATAN:									
	1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	879	12.831	12.831	12.831	12.831	52.203
	2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	97	1.934	1.934	1.934	1.934	7.833
	3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	60	440	484	484	484	1.952
	4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4
	5	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
	7	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4
	8	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	1	-	-	-	-	1
	9	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
	10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan									
OUTPUT KEGIATAN:									
	1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS									
2 Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu									
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh									
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu									
OUTPUT KEGIATAN:									
	1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	74	-	-	-	40	114
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS									
3 Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan									
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman									
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman									
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman									
OUTPUT KEGIATAN:									
	1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	1	1	1	1	4
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel									
OUTPUT KEGIATAN:									
	1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5

PROGRAM/ KEGIATAN				SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR				SATUAN	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1				-2				-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman														
OUTPUT KEGIATAN:														
		1	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan					Rekomendasi Kebijakan	1	2	2	2	2	9
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman														
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS														
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman													
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III														
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III														
OUTPUT KEGIATAN:														
		1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)					Layanan	1	1	1	1	1	5
		2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)					Layanan	1	1	1	1	1	5
		3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)					Layanan	-	1	1	1	1	4
		4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)					Layanan	-	1	1	1	1	4
		5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)					Layanan	-	1	1	1	1	4
		6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)					Layanan	1	1	1	1	1	5
		7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)					Layanan	-	1	1	1	1	4
		8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)					Layanan	-	1	1	1	1	4
		9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)					Layanan	-	1	1	1	1	4
		10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)					Layanan	-	1	1	1	1	4
		11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)					Layanan	-	1	1	1	1	4
		12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)					Layanan	-	1	1	1	1	4

4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dibutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, baik berupa prasarana, dukungan regulasi, maupun sumber pendanaan. Sumber pendanaan dapat diperoleh dari APBN maupun Non APBN. Indikasi kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025–2029 sebesar Rp 9,32 Triliun.

Tabel 4.2 Rencana Kerangka Pendanaan BP3KP Sumatera III Tahun 2025–2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR		ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1		-2	-10	-11	-12	-13	-14	-15
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan								
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:								
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi							
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak								
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi								
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III								
OUTPUT KEGIATAN:								
	1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	50.000	175.000	184.450	194.410	204.908	808.769
	2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	-	60.000	63.240	66.655	70.254	260.149
	3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	115.020	40.000	42.160	44.437	46.836	288.453
	4	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	349.758	-	-	-	-	349.758
	5	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	-	643.026	677.749	714.348	752.923	2.788.046
	6	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	-	391.824	412.982	435.284	458.789	1.698.879
	7	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	-	630.276	664.311	700.184	737.994	2.732.764
	8	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	-	190.000	200.260	211.074	222.472	823.806
	9	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	-	155.000	163.370	172.192	181.490	672.052
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum								
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III								
OUTPUT KEGIATAN:								
	1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	-	17.236.554	17.923.270	18.747.328	19.846.072	73.753.224

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14	-15
	2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	-	-	-	-	-
	3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	88.900	93.701	98.760	281.361
	4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	-	592.975	624.996	658.745	694.318	2.571.034
	5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	90.000	94.860	99.982	105.381	390.224
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	105.000	110.670	116.646	122.945	455.261
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni									
SASARAN KEGIATAN:									
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni									
OUTPUT KEGIATAN:									
	1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	29.886.000	310.606.432	326.099.865	341.593.297	357.086.730	1.365.272.324
	2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	68.867.526	833.446.905	858.409.036	899.193.176	939.977.316	3.599.893.959
	3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	120.000.000	828.310.919	918.777.200	960.449.600	1.002.122.000	3.829.659.719
	4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan	-	88.500	93.279	98.316	103.625	383.720
	5	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	384.455	405.216	427.097	450.160	1.666.928
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	246.000	259.284	273.285	288.043	1.066.612
	7	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	225.000	237.150	249.956	263.454	975.560
	8	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	-	-	-	-	-
	9	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	120.000	126.480	133.310	140.509	520.299
	10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	2.091.200	2.204.125	2.323.148	2.448.598	9.067.070
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan									
SASARAN KEGIATAN:									
Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan									
OUTPUT KEGIATAN:									
	1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	85.000	89.590	94.428	99.527	368.545

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2	-3	-10	-11	-12	-13	-14	-15
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS								
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu							
SASARAN PROGRAM:								
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh								
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh								
SASARAN KEGIATAN:								
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu								
OUTPUT KEGIATAN:								
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	148.000.000	-	-	-	96.800.000	244.800.000
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS								
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan							
SASARAN PROGRAM:								
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman								
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SASARAN KEGIATAN:								
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman								
OUTPUT KEGIATAN:								
1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	52.600	75.000	100.000	125.000	352.600
SASARAN KEGIATAN:								
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel								
OUTPUT KEGIATAN:								
1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	129.232	182.150	200.365	220.410	242.451	974.608
SASARAN KEGIATAN:								
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman								
OUTPUT KEGIATAN:								
1	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan	174.233	450.000	495.000	544.500	598.950	2.262.683

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	ANGGARAN (Rp Ribu)					
		2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2	-10	-11	-12	-13	-14	-15
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman							
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS							
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III							
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III							
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III							
OUTPUT KEGIATAN:							
	1 Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	13.639.496	37.339.608	39.206.588	41.166.917	43.225.263	174.577.882
	2 Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	23.204	75.900	79.695	83.680	87.864	350.343
	3 Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	-	80.850	85.216	89.818	94.668	350.551
	4 Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	-	139.500	147.033	154.973	163.341	604.847
	5 Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	-	120.000	126.480	133.310	140.509	520.299
	6 Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	31.988	338.681	355.615	373.395	392.065	1.491.744
	7 Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	-	12.600	13.280	13.998	14.753	54.631
	8 Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	-	14.131	14.894	15.698	16.546	61.269
	9 Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	-	80.000	84.320	88.873	93.672	346.866
	10 Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	-	14.000	14.756	15.553	16.393	60.702
	11 Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	-	80.000	84.320	88.873	93.672	346.866
	12 Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.582

BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis BP3KP Sumatera III Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi balai selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi komitmen BP3KP Sumatera III dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta mendorong terwujudnya tata kelola penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang akuntabel, efektif, dan berintegritas.

Renstra ini disusun dengan memperhatikan karakteristik wilayah kerja yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, yang menghadapi tantangan berupa kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), keberadaan kawasan kumuh di kawasan perkotaan dan pesisir, kondisi geografis kepulauan, serta kerentanan terhadap bencana alam, khususnya di Sumatera Barat, yang berdampak langsung terhadap ketahanan dan keberlanjutan hunian. Kondisi tersebut menuntut pendekatan pembangunan yang adaptif, tangguh terhadap bencana, berbasis data, serta terintegrasi lintas sektor dan lintas sumber pembiayaan.

Dalam periode 2025–2029, BP3KP Sumatera III menetapkan 2 (dua) tujuan strategis yang terintegrasi, yang pertama adalah Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif, dan tujuan kedua yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuan–tujuan ini diimplementasikan melalui 2 (dua) Sasaran Strategis (SS), yaitu SS–1 yang mengukur persentase rumah tangga yang difasilitasi akses hunian layak dan terjangkau, luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu, terwujudnya ekosistem perumahan yang mendukung hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta persentase desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni, sementara SS–2 mengukur kualitas dukungan manajemen balai.

Pelaksanaan strategi pembangunan tidak hanya bertumpu pada dukungan APBN, tetapi juga memerlukan penguatan sinergi pendanaan dan pengamanan integritas program. Optimalisasi seluruh sumber daya pembiayaan yang tersedia menjadi

keharusan, sehingga kolaborasi pendanaan (*collaborative funding*) dengan Pemerintah Daerah melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan Dana Desa perlu diintensifkan. Selain itu, kemitraan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta pemanfaatan inisiatif *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari sektor swasta harus diperluas sebagai bagian dari skema pembiayaan alternatif yang terintegrasi dan saling melengkapi. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu memperluas cakupan layanan, meningkatkan efektivitas intervensi, serta mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Sumatera III.

Di samping aspek pendanaan, balai perlu mendorong implementasi teknologi konstruksi inovatif yang efisien, cepat, dan adaptif terhadap risiko bencana, seperti sistem pra-cetak RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) dan RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat). Penggunaan teknologi tersebut terbukti lebih unggul dalam aspek kecepatan pembangunan, efisiensi biaya, serta ketahanan struktur dibandingkan metode konvensional, sehingga sangat relevan untuk wilayah rawan bencana, terutama di Sumatera Barat. Penerapan inovasi teknologi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu bangunan dan keberlanjutan hunian yang dibangun melalui program pemerintah.

Penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel juga menjadi pilar utama pelaksanaan Renstra. Hal ini mencakup pengamanan integritas program, pengendalian risiko penyimpangan, serta memastikan integrasi data calon penerima bantuan dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna menjamin ketepatan sasaran dan menghindari duplikasi bantuan. Konsistensi data dan ketepatan formulasi perhitungan indikator kinerja yang telah ditetapkan harus dijaga secara ketat sebagai bagian dari sistem pengendalian internal yang andal.

Mekanisme pengukuran capaian kinerja BP3KP Sumatera III akan didasarkan pada hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan terintegrasi. IKU tersebut dijabarkan secara rinci dalam Rencana Kinerja (Renja) tahunan dan dilaporkan secara periodik melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP tahunan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban publik, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan umpan balik strategis untuk perbaikan berkelanjutan serta penentuan langkah korektif yang konstruktif sepanjang periode Renstra.

Dengan komitmen, profesionalisme, integritas, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan, BP3KP Sumatera III optimis dapat melaksanakan peran strategisnya secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran

strategis kementerian. Renstra ini diharapkan menjadi instrumen pengarah yang memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan dilaksanakan secara konsisten, terukur, tepat sasaran, serta berkelanjutan, guna mewujudkan hunian yang layak, aman, tangguh terhadap bencana, dan berkeadilan bagi masyarakat di Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Lampiran 1. Matriks dan Kerangka Pendanaan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan														
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:														
1 Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi														
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak														
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja terpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III														
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	50.000	175.000	184.450	194.410	204.908	808.769
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	60.000	63.240	66.655	70.254	260.149
3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	1	1	1	1	1	5	115.020	40.000	42.160	44.437	46.836	288.453
4	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	-	-	-	-	1	349.758	-	-	-	-	349.758
5	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	643.026	677.749	714.348	752.923	2.788.046
6	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	391.824	412.982	435.284	458.789	1.698.879
7	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	630.276	664.311	700.184	737.994	2.732.764
8	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	190.000	200.260	211.074	222.472	823.806
9	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	155.000	163.370	172.192	181.490	672.052
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III														
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	-	1.176	1.176	1.176	1.176	4.704	-	17.236.554	17.923.270	18.747.328	19.846.072	73.753.224
2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	1	1	1	3	-	-	88.900	93.701	98.760	281.361
4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	592.975	624.996	658.745	694.318	2.571.034
5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	90.000	94.860	99.982	105.381	390.224
6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	105.000	110.670	116.646	122.945	455.261
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni														
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	879	12.831	12.831	12.831	12.831	52.203	29.886.000	310.606.432	326.099.865	341.593.297	357.086.730	1.365.272.324
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	97	1.934	1.934	1.934	1.934	7.833	68.867.526	833.446.905	858.409.036	899.193.176	939.977.316	3.599.893.959

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	60	440	484	484	484	1.952	120.000.000	828.310.919	918.777.200	960.449.600	1.002.122.000	3.829.659.719
4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	88.500	93.279	98.316	103.625	383.720
5	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	384.455	405.216	427.097	450.160	1.666.928
6	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	246.000	259.284	273.285	288.043	1.066.612
7	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	225.000	237.150	249.956	263.454	975.560
8	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
9	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	120.000	126.480	133.310	140.509	520.299
10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	2.091.200	2.204.125	2.323.148	2.448.598	9.067.070
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan														
SASARAN KEGIATAN:														
Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan														
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4	-	85.000	89.590	94.428	99.527	368.545
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS														
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu													
SASARAN PROGRAM:														
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh														
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh														
SASARAN KEGIATAN:														
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu														
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar	74	-	-	-	40	114	148.000.000	-	-	-	96.800.000	244.800.000
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS														
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan													
SASARAN PROGRAM:														
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman														
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman														
SASARAN KEGIATAN:														
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman														
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	-	1	1	1	1	4	-	52.600	75.000	100.000	125.000	352.600
SASARAN KEGIATAN:														
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel														
OUTPUT KEGIATAN:														
1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	129.232	182.150	200.365	220.410	242.451	974.608

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1			-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman																
OUTPUT KEGIATAN:																
		1	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan	1	2	2	2	2	9	174.233	450.000	495.000	544.500	598.950	2.262.683
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman																
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS																
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman															
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III																
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III																
OUTPUT KEGIATAN:																
	1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)		Layanan	1	1	1	1	1	5	13.639.496	37.339.608	39.206.588	41.166.917	43.225.263	174.577.882
	2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)		Layanan	1	1	1	1	1	5	23.204	75.900	79.695	83.680	87.864	350.343
	3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)		Layanan	-	1	1	1	1	4	-	80.850	85.216	89.818	94.668	350.551
	4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)		Layanan	-	1	1	1	1	4	-	139.500	147.033	154.973	163.341	604.847
	5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)		Layanan	-	1	1	1	1	4	-	120.000	126.480	133.310	140.509	520.299
	6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)		Layanan	1	1	1	1	1	5	31.988	338.681	355.615	373.395	392.065	1.491.744
	7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)		Layanan	-	1	1	1	1	4	-	12.600	13.280	13.998	14.753	54.631
	8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)		Layanan	-	1	1	1	1	4	-	14.131	14.894	15.698	16.546	61.269
	9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)		Layanan	-	1	1	1	1	4	-	80.000	84.320	88.873	93.672	346.866
	10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)		Layanan	-	1	1	1	1	4	-	14.000	14.756	15.553	16.393	60.702
	11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)		Layanan	-	1	1	1	1	4	-	80.000	84.320	88.873	93.672	346.866
	12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)		Layanan	-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.582

Lampiran 2. Metode Perhitungan

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan					
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Hunian Layak					
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi					
SK 1 Meningkatkan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	IKSK 1 Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	OK 1 Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
		OK 2 Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
		OK 3 Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 5 laporan		
		OK 4 Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasikegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 kegiatan 2027: - kegiatan 2029: - kegiatan 2026: - kegiatan 2028: - kegiatan Total : 1 kegiatan		
		OK 5 Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
		OK 6	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal		
		OK 7	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal		
		OK 8	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal		
		OK 9	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal		
Kegiatan 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum								
SK 1	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	IKSK 1	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: 1.176 unit 2029: 1.176 unit 2026: 1.176 unit 2028: 1.176 unit Total : 4.704 unit	Non Kumulatif	Internal
					(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)			

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN			TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)			(5)	(6)
SK 1	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	IKSK 2	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal	OK 2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III			Non Kumulatif	Internal
						Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III				
		Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - unit 2027: - unit 2029: - unit 2026: - unit 2028: - unit Total : - unit								
		IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU	OK 3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III			Non Kumulatif	Internal
						Capaian = Jumlah realisasi dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III				
Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: - dokumen 2028: 1 dokumen Total : 3 dokumen										
OK 4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	OK 4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan oleh Balai...			Non Kumulatif	Internal		
				Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan di Balai...						
				Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen						
OK 5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	OK 5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III			Non Kumulatif	Internal		
				Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III						
				Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total : 4 dokumen						
OK 6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	OK 6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III			Non Kumulatif	Internal		
				Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III						
				Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan						
Kegiatan 3: Penyediaan Rumah Layak Huni										
SK 1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	IKSK 1	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	OK 1	Jumlah unit rumah swadaya <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah unit rumah swadaya oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III			Non Kumulatif	Internal
						Capaian = Jumlah realisasi jumlah unit rumah swadaya di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III				
						Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 879 unit 2027: 12.831unit 2029: 12.831 unit 2026: 12.831 unit 2028: 12.831 unit Total : 52.479 unit				

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
	IKSK 2	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	OK 2	Jumlah rumah khusus yang terbangun <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 97 unit 2027: 1.934 unit 2029: 1.934 unit 2026: 1.934 unit 2028: 1.934 unit Total : 7.876 unit	Non Kumulatif	Internal
			OK 3	Jumlah rumah susun yang terbangun <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 60 unit 2027: 484 unit 2029: 484 unit 2026: 440 unit 2028: 484 unit Total : 1.994 unit	Non Kumulatif	Internal
	IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman	OK 4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi laporan penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
			OK 5	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total : 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
OK 6			Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal	
			OK 7	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan 2027: - laporan 2029: - laporan 2026: - laporan 2028: - laporan Total : 1 laporan		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN			TIPE PERHITUNGAN		SUMBER DATA	
(1)		(2)		(3)		(4)			(5)		(6)	
				OK 8	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III						
				Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III								
				Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - rekomendasi kebijakan								

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SASARAN PROGRAM 2: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh					
Kegiatan 1: Penanganan Permukiman Kumuh					
SK 1 Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	IKSK 1 Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	OK 1 Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Capaian dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian = Realisasi penanganan kumuh oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target tahunan sebagai pelaksana (Ha): 2025: 74 Ha 2027: - Ha 2029: 40 Ha 2026: - Ha 2028: - Ha Total: 144 Ha	Non Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM 3: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
Kegiatan 1: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman					
SK 1 Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	IKSK 1 Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	OK 1 Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III mulai tahun 2026 Capaian = Realisasi laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total: 4 Laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 2: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel					
SK 1 Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	IKSK 1 Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	OK 1 Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan penerapan zona integritas di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan pembangunan dan penerapan zona integritas di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total : 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 3: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
SK 1 Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	IKSK 1 Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	OK 1 Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Dihitung dari realisasi jumlah penerapan Manajemen Risiko dan pelaksanaan SMAP di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan penerapan Manajemen Risiko dan pelaksanaan SMAP di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 2 rekomendasi kebijakan 2029: 2 rekomendasi kebijakan 2026: 2 rekomendasi kebijakan 2028: 2 rekomendasi kebijakan Total : 9 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN					
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
SASARAN PROGRAM 1: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III					
Kegiatan 1: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III					
SK 1 Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	IKSK 1 Tingkat layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	OK 1 Jumlah Layanan Perkantoran <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan perkantoran oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi layanan perkantoran di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanann 2028: 1 layanan Total : 5 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 2 Jumlah Layanan Umum <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanann 2028: 1 layanan Total : 5 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 3 Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen KP)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanann 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 4 Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen Perumahan Perdesaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanann 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 5 Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanann 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		OK 6 Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan sarana internal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi layanan sarana internal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 5 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 7 Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai... Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai... Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 8 Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 9 Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai... Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai... Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 10 Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanann 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 11 Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanann 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 12 Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan reformasi kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Capaian = Jumlah realisasi layanan reformasi kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanann 2028: 1 layanan Total : 4 layanan	Non Kumulatif	Internal

